

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 166 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN IMPLEMENTASI
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PADA PEMERINTAH DAERAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden terkait peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilakukan percepatan implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menunjuk tim pelaksana dan *monitoring* percepatan implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memiliki kompetensi dan berintegritas untuk melaksanakan dan memonitor percepatan implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA DAN *MONITORING* PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana dan *Monitoring* Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dan *Monitoring* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Kelompok Kerja Pelaksana;
 3. Kelompok Kerja Dukungan Sistem Teknologi Informasi; dan
 4. Kelompok Kerja *Monitoring*.
- KETIGA : Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Pengarah
 - a. memberikan pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kelompok kerja pelaksana, kelompok kerja dukungan sistem teknologi informasi, dan kelompok kerja *monitoring*.
 - b. pengarahan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dibagi berdasarkan wilayah provinsi.
 - c. pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Kelompok Kerja Pelaksana
 - a. melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal, meliputi antara lain:
 - 1) penelaahan produk.
 - 2) pembuatan etalase produk.
 - 3) pembaruan informasi dan penambahan produk.

- 4) pendaftaran dan penayangan Penyedia Katalog Elektronik Lokal.
 - 5) *E-purchasing*.
 - b. selain melaksanakan pendampingan penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan pendampingan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Toko Daring.
 - c. melakukan *monitoring* dan pelaporan pelaksanaan dan hasil pendampingan kepada kelompok kerja *monitoring*.
 - d. untuk melakukan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada huruf c, penanggung jawab menunjuk salah satu anggota kelompok kerja.
3. Kelompok Kerja Dukungan Sistem Teknologi Informasi memberikan dukungan penguatan layanan *front end/helpdesk* yang berkaitan dengan keluhan terhadap sistem.
 4. Kelompok Kerja *Monitoring* mengumpulkan, mengelola, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang dibutuhkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Pelaksana dan *Monitoring* dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan tugas oleh tim berdasarkan:

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah; dan

2. Surat Tugas Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9935/SES/04/2022 tanggal 26 April 2022;

diserahterimakan kepada Tim Pelaksana dan *Monitoring* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah; dan
2. Surat Tugas Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9935/SES/04/2022 tanggal 26 April 2022;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana dan *Monitoring*, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

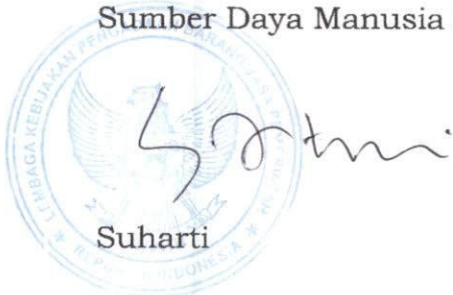
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAKSANA DAN
MONITORING PERCEPATAN
IMPLEMENTASI KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL PADA
PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 166 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JUNI 2022

**TIM PELAKSANA DAN MONITORING PERCEPATAN IMPLEMENTASI
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PADA PEMERINTAH DAERAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah		
	Monitoring	1. Robin Asad Suryo	Rp750.000,00
	Wilayah Sumatera 1, Sumatera 2, Sumatera 3, Banten dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2. Sarah Sadiqa	Rp750.000,00
	Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur	3. Gatot Pambudhi Poetranto	-
	Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua dan Papua Barat	4. Sutan Suangkupon Lubis	Rp750.000,00
	Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku	5. Setya Budi Arijanta	Rp750.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
2.	Kelompok Kerja Pelaksana		
a.	Kelompok Kerja Wilayah Sumatera 1 (Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung), Banten dan Jakarta		
	Penanggung Jawab	Emin Adhy Muhaemin	Rp700.000,00
	Anggota	1. Rusli Maryadi	Rp500.000,00
		2. Antonius Lambok Sihombing	Rp500.000,00
		3. Imam Arumsyah	Rp500.000,00
		4. Deasy Rachmawati	Rp500.000,00
		5. Eva Sinaga	Rp500.000,00
		6. Annisa Putri	Rp500.000,00
		7. Yustitia Fernando	-
		8. Nurmi Yanti Wulandari	-
b.	Kelompok Kerja Wilayah Sumatera 2 (Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi)		
	Penanggung Jawab	Raden Ari Widiyanto	Rp700.000,00
	Anggota	1. Zulhenny	Rp500.000,00
		2. Dwi Satrianto	Rp500.000,00
		3. Thanthawi Jauhari	Rp500.000,00
		4. Fram Nugraha	Rp500.000,00
		5. Puteri Rengganis	Rp500.000,00
		6. Wuri Setianingrum	Rp500.000,00
		7. Henky Rizky Widiardi	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
c.	Kelompok Kerja Wilayah Sumatera 3 (Sumatera Utara dan Aceh)		
	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Rp700.000,00
	Anggota	1. Yuyu Yulianti	Rp500.000,00
		2. Theodore Sutarto	Rp500.000,00
		3. Gigih Pribadi	Rp500.000,00
		4. Anita Carollin	Rp500.000,00
		5. Eristya Dessy Astarina	Rp500.000,00
		6. Sofie Maghfira	Rp500.000,00
		7. Niken Mustikarini	Rp500.000,00
		8. Henky Rizky Widiardi	-
d.	Kelompok Kerja Wilayah Jawa Barat		
	Penanggung Jawab	Patria Susantosa	Rp700.000,00
	Anggota	1. Fajar Adi Hemawan	Rp500.000,00
		2. Sugianto	Rp500.000,00
		3. Mahsa Elvina Rahmawyanet	Rp500.000,00
		4. Aloysius Sigit Wicaksono	Rp500.000,00
		5. Rizky Dwi Raharjo	Rp500.000,00
		6. Yudhianto Dwi Andika Putra	Rp500.000,00
		7. Alina Mahardhika Puspa	Rp500.000,00
		8. Cecep Sutisna	Rp500.000,00
		9. Audita Octaviani	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		10. Dissa Patricia	Rp500.000,00
		11. Niken Novia Sitaresmi	-
e.	Kelompok Kerja Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
	Penanggung Jawab	Fadli Arif	Rp700.000,00
	Anggota	1. Heldi Yudiyatna	Rp500.000,00
		2. Andy Martanto	Rp500.000,00
		3. Muhammad Qadr Siddiq Zam	Rp500.000,00
		4. Dara Kumala Arumbuana	Rp500.000,00
		5. Mustika Rosalina Putri	Rp500.000,00
		6. Himawan Giri Dahlan	Rp500.000,00
		7. Ikbal Amaludin	Rp500.000,00
		8. Ayu Rosalina Wibowo	Rp500.000,00
		9. Made Widhiantika	Rp500.000,00
		10. Frans Yoenero	Rp500.000,00
		11. Paramitha Agdina Pusparini	-
		12. Dita Prima Tri Hapsari	-
		13. Eko Nirwanto Putro Hanardi	-
f.	Kelompok Kerja Wilayah Jawa Timur		
	Penanggung Jawab	Yulianto Prihhandoyo	-
	Anggota	1. Erlangga Aninditya	-

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		2. Desi Kartika	Rp500.000,00
		3. Febrita Sidabalok	-
		4. Eben Henry Reagen Mangihut Simanjutak	Rp500.000,00
		5. Ahmad Khairunnas	Rp500.000,00
		6. L. Rani Esi Hapsari	-
		7. Agung Ismail	-
		8. Euodia Putri Prastika	-
g.	Kelompok Kerja Wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali		
	Penanggung Jawab	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Rp700.000,00
	Anggota	1. Januar Indra	Rp500.000,00
		2. Ria Agustina Nasution	Rp500.000,00
		3. Rovazio Okiiza	Rp500.000,00
		4. Dipo Adi Negoro	Rp500.000,00
		5. Rezang Patuh Rohmad	Rp500.000,00
		6. Novida Widarani	-
		7. Paramitha Agdina Pusparini	-
		8. Dita Prima Tri Hapsari	-
		9. Eko Nirwanto Putro Hanardi	-
h.	Kelompok Kerja Wilayah Papua		
	Penanggung Jawab	R. Fendy Dharma Saputra	Rp700.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
	Anggota	1. Muhammad Firdaus	Rp500.000,00
		2. Windy Dian Trisari	Rp500.000,00
		3. Adreng Kusuma Ayuningtyas	Rp500.000,00
		4. Ahmad Wiza Walady	Rp500.000,00
		5. Anindita Widya Sismiati	Rp500.000,00
		6. Agung Ismail	-
		7. Diani Bahri Puteri	-
		8. Mexi Osmond Soyan	Rp500.000,00
		9. Debora D. Salosa (Pemerintah Provinsi Papua)	Rp500.000,00
		10. Herson Martinus (Pemerintah Provinsi Papua)	Rp500.000,00
i.	Kelompok Kerja Wilayah Papua Barat		
	Penanggung Jawab	Hardi Afriansyah	Rp700.000,00
	Anggota	1. Arif Rachman	Rp500.000,00
		2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Rp500.000,00
		3. Wildan Massani	Rp500.000,00
		4. Budi Bowo Laksono	Rp500.000,00
		5. Yosi Febriani	Rp500.000,00
		6. Hery Fadhly Zulni	-

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		7. Agung Ismail	Rp500.000,00
		8. Krens Jansen Kapitarauw	Rp500.000,00
j.	Kelompok Kerja Wilayah Kalimantan		
	Penanggung Jawab	M. Aris Supriyanto	Rp700.000,00
	Anggota	1. Muhamad Dwi Sumanto	Rp500.000,00
		2. Seno Haryo Wibowo	Rp500.000,00
		3. Ade Rizky Emirsyah	Rp500.000,00
		4. Erwin Sondang S	Rp500.000,00
		5. Aisyah Khoirun Nisa	Rp500.000,00
		6. Joko Budi Sulistyo	Rp500.000,00
		7. Maharani Okifitriana	Rp500.000,00
		8. Niken Novia Sitaresmi	Rp500.000,00
		9. Yustitia Fernando	Rp500.000,00
k.	Kelompok Kerja Wilayah Sulawesi		
	Penanggung Jawab	Iwan Herniwan	Rp700.000,00
	Anggota	1. Tjipto Prasetyo Nugroho	Rp500.000,00
		2. Eko Rinaldo Octavianus	Rp500.000,00
		3. Muhammad Havis Adhitya	Rp500.000,00
		4. Fika Dautar Adika Putra	Rp500.000,00
		5. Diani Bahri Puteri	Rp500.000,00
		6. Astri Erviana	Rp500.000,00
		7. Euodia Putri Prastika	Rp500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		8. Hery Fadhly Zulni	Rp500.000,00
1.	Kelompok Kerja Wilayah Maluku		
	Penanggung Jawab	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Rp700.000,00
	Anggota	1. Arif Budiman	Rp500.000,00
		2. Mira Erviana	Rp500.000,00
		3. Febri Kamalisa Rachman	Rp500.000,00
		4. Moch. Ilham Riswanda	Rp500.000,00
		5. Siti Horiah	Rp500.000,00
		6. Eko Nirwanto Putro Hanardi	Rp500.000,00
		7. Paramitha Agdina Pusparini	Rp500.000,00
		8. Novida Widarani	Rp500.000,00
		9. Dita Prima Tri Hapsari	Rp500.000,00
3	Kelompok Kerja Dukungan Sistem Teknologi Informasi		
	Penanggung Jawab	1. Shahandra Hanitiyo	-
	Wakil Penanggung Jawab	2. Patria Susantosa	-
	Anggota	1. Erlangga Aninditya	Rp500.000,00
		2. Andri Priyo Utomo	Rp500.000,00
		3. Aloysius Sigit Wicaksono	-
		4. Febrita Sidabalok	Rp500.000,00
		5. Anas Bayu Kusuma	-

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		6. Dede Agustina Muhajirin	-
		7. Muhammad Fakhri Naufaldi	Rp500.000,00
		8. Hendarwan Suryandaru	-
		9. Yudhianto Dwi Andika Putra	-
4	Kelompok Kerja <i>Monitoring</i>		
	Penanggung Jawab	Shahandra Hanitiyo	Rp700.000,00
	Wakil Penanggung Jawab Kelompok Kerja/ Anggota	1. Gusmelinda Rahmi	-
		2. Suharti	Rp500.000,00
		3. Hermawan	Rp500.000,00
	Anggota	1. Hermin Esti (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)	Rp500.000,00
		2. Nyimas Dwi Koryati (Kementerian Dalam Negeri)	Rp500.000,00
		3. Mustika Rosalina Putri	-
		4. Dodi Wahyugi	Rp500.000,00
		5. Edi Kristiyanto	-
		6. Miftah Irfaniah	Rp500.000,00
		7. Rinaldi Morintoh	Rp500.000,00
		8. Mochammad Andhika Ranga Lazuardi	-

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
		9. Angga Widita Amirul	Rp500.000,00
		10. Mieke Eka Putri	Rp500.000,00
		11. Nicke Kusuma Devi	Rp500.000,00
		12. Estu Retno Yulianti	Rp500.000,00
		13. Ikbal Amaludin	-
		14. Manshur Riadli	Rp500.000,00
		15. Dede Agustina Muhajirin	Rp500.000,00
		16. Imelda Liliana	Rp500.000,00
		17. Jidda Hadiyana	Rp500.000,00
		18. L. Rani Esi Hapsari	Rp500.000,00
		19. Hendarwan Suryandaru	Rp500.000,00
		20. Cherish Shery Desarya	Rp500.000,00
		21. Ayu Rosalina Wibowo	-
		22. Made Widhiantika	-

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS